

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM)  
 BULAN BERIKUTNYA

1. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM)  
 BULAN BERIKUTNYA UNTUK SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
 SKPD .....  
 LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN  
 PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA  
 TAHUN ANGGARAN .....

No. Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah					
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah					
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
	Jumlah					
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang					
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Tanah					
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin					
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan					
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan					

2.2.5	Belanja Aset Tetap lainnya					
2.2.6	Belanja Aset Lainnya					
	Jumlah					
	Surplus/(Defisit)					

2. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA UNTUK PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
PPKD  
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN  
PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA  
TAHUN ANGGARAN .....

No. Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.2	Dana Perimbangan					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak					
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya alam)					
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum					
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus					
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat lainnya					
1.2.2.1	Dana Otonomi khusus					
1.2.2.2	Dana Penyesuaian					
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hibah					
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat					
1.3.3	Pendapatan Lainnya					
	Jumlah					

2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Bunga					
2.1.2	Belanja Subsidi					
2.1.3	Belanja Hibah					
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial					
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan					
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak terduga					
	Jumlah					

1	2	3	4	5	6	7
2.4	TRANSFER					
	Surplus/Defisit					
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah					
	Jumlah					
	PENGELUARAN DAERAH					
	Pembentukan Dana Cadangan					
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah					
	Pembayaran Pokok Utang					
	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Jumlah					
	Pembiayaan Netto					
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)					

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
SKPD .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31  
DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			

1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah			
	Jumlah			
2.	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang			
	Jumlah Belanja Operasi			
2.2	BELANJA MODAL			
2.2.1	Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
	Jumlah			
	Surplus/(Defisit)			

## 2. FORMAT NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
NERACA SKPD .....  
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				

Kas di bendahara Penerimaan Kas di bendahara pengeluaran Piutang Piutang Retribusi Piutang lain-lain Persediaan				
Jumlah				
ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat berat Alat-alat angkutan Alat-alat bengkel Alat pertanian dan peternakan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga Alat studio dan alat komunikasi Alat ukur Alat-alat kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat keamanan Gedung dan bangunan Bangunan gedung Bangunan monumen Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang bercorak kesenian/kebudayaan Hewan/ternak dan Tumbuhan Konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
Jumlah				
ASET LAINNYA Tagihan penjualan angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak berwujud Aset Lain-lain				
Jumlah				

JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang perhitungan Pihak Ketiga				
Uang muka dari Kas daerah				
Pendapatan diterima dimuka/				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
SiLPA				
Cadangan Piutang				
Cadangan Persediaan				
Jumlah				
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam asset tetap				
Diinvestasikan dalam asset lainnya-				
Cadangan Persediaan				
Jumlah				
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI				
RK PPKD				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

3. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
SKPD .....  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X1	KENAIKAN / PENURUNAAN	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
2.	BEBAN				
	BEBAN OPERASI				
	Beban pegawai				
	Beban Barang/Jasa				
	Beban Bunga				
	Beban Subsidi				
	Beban Hibah				
	Beban Bantuan Sosial				
	Beban Penyusutan				
	Beban lain-lain Jumlah Beban Operasi				
	JUMLAH BEBAN				
	SURPLUS/DEFISIT-LO				

#### 4. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
SKPD.....

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS / DEFISIT-LO		
3	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	XXX	XXX
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

## 5. FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
SKPD  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda	
		3.1.1	Pendapatan
		3.1.2	Beban
		3.1.3	Belanja
		3.1.4	Aset
		3.1.5	Kewajiban
		3.1.6	Ekuitas Dana
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda		
Bab V	Penutup		

C. FORMAT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ....

(dalam rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah			
1.1.3	Pndapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah			
1.2	PENDAPATAN TRANSFER			
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum			
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat lainnya			
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi			
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya			
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			

1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat			
1.3.3	Pendapatan Lainnya			
	Jumlah			
2.	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1	Belanja Bunga			
2.1.2	Belanja subsidi			
2.1.3	Belanja hibah			
2.1.4	Belanja bantuan social			
2.1.5	Belanja bantuan keuangan			
2.2	BELANJA MODAL			
2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2.3.1	Belanja Tidak terduga			
	Jumlah			
2.4	TRANSFER			
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak			
2.4.1.2	Bagi Hasil retribusi			
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
	Surplus/(Defisit)			
3	PEMBIAYAAN			
3.1.	PENERIMAAN DAERAH			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah			
3.2	PENGELUARAN DAERAH			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

....., Tanggal, .....

BUPATI BOYOLALI

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

## 2. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan Saldo Awal Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Sub Total (1+2)		
4	Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiLKA)		
5	Sub Total (3+4)		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		

### 3. FORMAT NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
NERACA  
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian	Tahun n (Rp)	Tahun n-1 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di bendahara Penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang dana Bagi Hasil		
Piutang DAU		
Piutang DAK		
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Piutang lain-lain		
Persediaan		
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman kepada perusahaan negara		
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi Dana Bergulir		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Peyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan		
Penyertaan Modal Proyek Patungan		
Investasi Permanen Lainnya		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Alat-alat berat		
Alat-alat angkutan		

Alat-alat bengkel		
Alat pertanian dan peternakan		
Alat-alat kantor dan Rumah Tangga		
Alat studio dan alat komunikasi		
Alat ukur		
Alat-alat kedokteran		
Alat-alat Laboratorium		
Alat-alat keamanan		
Gedung dan bangunan		
Bangunan gedung		
Bangunan monumen		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air (irigasi)		
Instalasi		
Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Buku dan Perpustakaan		
Barang bercorak kesenian/kebudayaan		
Hewan/ternak dan Tumbuhan		
Konstruksi dalam pengerjaan		
Konstruksi dalam pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan penjualan angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak berwujud		
Aset Lain-lain		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang perhitungan Pihak Ketiga		
Uang muka dari Kas daerah		
Pendapatan diterima dimuka/		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri		
Utang Luar Negeri		
Utang jangka panjang lainnya		

EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek		
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		
Diinvestasikan dalam aset tetap		
Diinvestasikan dalam aset lainnya-		
Cadangan Persediaan		
Jumlah		
EKUITAS DANA Cadangan		
Diinvestasikan dalam dana cadangan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

....., Tanggal, .....

BUPATI BOYOLALI

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

4. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 20X1	Tahun 20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak daerah				
Pendapatan Retribusi daerah				
Pndapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah				
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA</b>				

<b>PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>				
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Pendapatan bagi hasil lainnya				
<b>Jumlah Transfer pemerintah Provinsi</b>				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Lainnya				
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang sah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BEBAN</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
beban Bunga				
beban subsidi				
beban hibah				
beban bantuan sosial				
Beban lain-lain				
<b>Jumlah Beban Operasi</b>				
<b>BEBAN TRANSFER</b>				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak				
Bagi Hasil retribusi				
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
Beban Transfer bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah lainnya				
Beban Transfer bantuan Keuangan ke Desa				
Beban Transfer bantuan Keuangan lainnya				
<b>Jumlah Beban transfer</b>				
<b>JUMLAH BEBAN</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>				
Surplus penjualan asset Non Lanacar				
Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang				
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya				

<b>Jumlah Surplus Non operasional</b>				
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
Defisit penjualan asset Non Lanacar				
Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang				
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya				
<b>Jumlah Defisit Non operasional</b>				
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>				
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Pendapatan luar biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Biasa				
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>				

#### 5. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
 LAPORAN ARUS KAS  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 an 20X0  
 Metode Langsung  
 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Penerimaan Pajak daerah		
	Penerimaan Retribusi daerah		
	Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		
	Penerimaan Dana Alokasi Umum		
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		
	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		

Penerimaan Dana Penyesuaian		
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		
Penerimaan bagi hasil lainnya		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Lainnya		
Penerimaan luar biasa		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Hibah		
Pembayaran Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak terduga		
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pencairan Dana cadangan		
Penjualan atas tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap		
Penjualan Aset lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap		
Perolehan Aset lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Peneluaran pembelian Investasi Non Permanen		
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		

	<p><b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b></p> <p><b>Arus Masuk Kas</b></p> <p>Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat</p> <p>Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya</p> <p>Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank</p> <p>Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank</p> <p>Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi</p> <p>Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya</p> <p>Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara</p> <p>Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah</p> <p>Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya</p> <p><b>Jumlah Arus Masuk Kas</b></p> <p><b>Arus Keluar Kas</b></p> <p>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat</p> <p>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya</p> <p>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank</p> <p>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank</p> <p>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi</p> <p>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya</p> <p>Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara</p> <p>Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah</p> <p>Pemberian Pinjaman Kepada Pemda Lainnya</p> <p><b>Jumlah Arus Keluar Kas</b></p> <p><b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b></p> <p><b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b></p> <p><b>Arus Masuk Kas</b></p> <p>Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga</p> <p><b>Jumlah Arus Masuk Kas</b></p> <p><b>Arus Keluar Kas</b></p> <p>Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga</p> <p><b>Jumlah Arus Keluar Kas</b></p> <p><b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b></p> <p><b>Kenaikan/Penurunan Kas</b></p>		
	<p><b>Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b></p> <p><b>Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b></p> <p><b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b></p> <p><b>Saldo Akhir Kas</b></p>		

## 6. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS / DEFISIT-LO		
3	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	XXX	XXX
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

## 7. FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	5.1.1	Pendapatan – LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Transfer
	5.1.4	Pembiayaan
	5.1.5	Pendapatan – LO
	5.1.6	Beban
	5.1.7	Aset
	5.1.8	Kewajiban
	5.1.9	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
Bab VII	Penutup

#### D. FORMAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB

##### 1. FORMAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD ..... Kabupaten Boyolali yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Arus Kas; dan
- (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran ..... Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengans tandar akuntansi pemerintah.

....., tanggal.....

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(Nama lengkap)

NIP.....

## 2. FORMAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Arus Kas; dan
- (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran ..... Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengans tandar akuntansi pemerintah.

....., tanggal.....

Bupati Boyolali  
(tandatangan)  
(Nama lengkap)

BUPATI BOYOLALI,  
ttd  
SENO SAMODRO